

Tak Catat Semua Aset, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran Hanya Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian



Sumber Photo: kaltim.tribunnews.com

Pemerintah Kota Tarakan tak mampu mempertahankan prestasinya sebagai daerah yang berhasil meraih opini¹ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 Tarakan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal, sejak 2012 lalu Tarakan selalu meraih predikat opini WTP.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Ade Iwan Ruswana tak menampik ada catatan khusus sehingga pihaknya hanya memberi WDP terhadap LKPD Tarakan. Persoalannya ada pada aset² dan jalan.

“Memang Tarakan belum semua mencatat tanah yang dimiliki, termasuk tanah badan jalan. Kedua, kalau istilah akuntansi itu ada biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap, Tarakan masih jauh belum akurat sehingga kami kecualikan itu,” terangnya usai menyerahkan LKPD kepada Pemerintah Kota Tarakan di kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Jumat (10/6).

Ade belum bisa menaksir berapa total anggaran dari aset dan jalan yang belum lengkap laporannya. Namun, berdasarkan data yang diperolehnya, untuk aset tanah sebanyak 108 ruas jalan belum tercatat. Karena itulah pihaknya memberikan catatan terhadap laporan keuangan pemerintah Tarakan. Namun, Ade memperkirakan nilai cukup signifikan.

“Hampir 108 ruas jalan belum tercatat dan kita pun tidak mengerti nilainya ini berapa. Karena tidak mengerti nilainya inilah akhirnya kita tidak koreksi. Kalau kita mengerti nilai dan luasannya akan kita koreksi. Jadi kita meminta Pemkot yang menginventarisir dulu nilainya berapa NJOP-nya,” ucapnya

Sementara terkait jalan, ia juga memprediksi ada penyusutan nilai yang cukup besar. Namun, karena laporan yang diterimanya belum lengkap, pihaknya tak bisa mengoreksi dan menjadi pengecualian.

¹ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan [Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

² Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya [Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah]

Ade juga menilai ada kekeliruan dalam pencatatan yang dilakukan pemerintah Tarakan. Pasalnya, jumlah ruas jalan yang tertera di SK Walikota Tarakan sebanyak 168. Sedangkan dalam daftar rinciannya mencapai 904 ruas jalan.

“Mungkin karena Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) yang tidak *up to date*. Kalau memang belum *up to date* mestinya petugas pencatatan juga lengkap perbaikan jalan ruas mana, ada nomor kontrak, jadi begitu teridentifikasi bisa langsung,” tambahnya.

Adanya beberapa catatan yang diberikan BPK RI kepada pemerintah Tarakan, tak lepas sistem penilaian yang digunakan tahun ini. Menurut Ade, memang ada sedikit perubahan sistem penilaian dengan menggunakan *Accrual Basis*³. Dengan memasukkan akumulasi penyusutan. maka, pencatatan aset harus rinci.

Diakui Ade, sistem yang baru ini memang agak merepotkan pemerintah daerah. Bukan hanya Tarakan saja, sejumlah daerah di Indonesia juga menemukan persoalan terhadap laporan keuangannya dengan menggunakan sistem baru ini.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan Khairul mengakui pihaknya memang direpotkan dengan sistem penilaian baru. Pemerintah Tarakan sendiri harus mendata ulang aset tanah dan ruas jalan yang ada sehingga butuh waktu untuk menyempurnakannya. Sebenarnya pihaknya telah mengupayakan proses pencatatan aset jalan dan tanah beberapa bulan ini. Namun karena banyaknya aset yang direvitalisasi ulang akhirnya tidak cukup waktu untuk tahun ini menyelesaikannya karena pihaknya juga diberi *deadline* untuk menyelesaikan laporan keuangan.

“Memang sistem penilaian tahun ini agak ribet dibandingkan penilaian sebelumnya, lebih rinci dan *complicated*. Karena seperti contoh saja penerimaan yang kita target, walaupun belum didapat harus sudah dicatat. Kalau dulu apa yang direalisasi itulah yang dicatat,” ujarnya.

Meski demikian, Khairul memastikan proses pendataan ulang itu tetap berjalan. Sehingga diharapkan tahun depan opini WTP bisa kembali ke tangan pemerintah Tarakan. “Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali. Cuma persoalan waktu saja,” imbuhnya.

Tarakan sebagai kota maju di Kalimantan Utara, justru lambat dalam menerapkan sistem penilaian *accrual basis* ini dibanding pemerintah Nunukan dan Malinau yang sukses meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2015.

Sumber Berita:

1. kaltim.tribunnews.com; *Tak Catat Semua Aset, Opini Laporan Keuangan Kota Ini Turun dari WTP jadi WDP*; Jumat 10 Juni 2016
2. bulungan.prokal.co; *Setelah Tiga Tahun, Tarakan Hanya WDP*; Sabtu 11 Juni 2016
3. tarakan.bpk.go.id; *Opini WDP untuk LKPD Tarakan, Bulungan, dan Tana Tidung*; Senin, 13 Juni 2015

³ Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar [Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah]

Catatan:

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.
- Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian Laporan Keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada kriteria:
 - (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
 - (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 - (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*).